



POLA HUBUNGAN MASYARAKAT LINTAS AGAMA DALAM MEWUJUDKAN HARMONISASI KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA DI DESA SINDANG SARI KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Idrus Ruslan

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

idrus.ruslan@radenintan.ac.id

Abstract

The pattern of community relations is the basis of social processes, which refers to the existence of dynamic patterns of social relations. Sindang Sari Village is one of the villages in Tanjung Bintang Subdistrict, South Lampung Regency, having Muslim, Christian, Catholic and Buddhist religious communities, while the people are Javanese, Sundanese, Palembang and Batak. However, the life and association of religious people there appear harmoniously and there has never been a conflict or dispute with a religious or cultural background. The results of this study indicate that the pattern of interfaith community relations in the village of Sindang Sari is associative, namely the form of relationships that lead to cooperation in various forms of social life and tolerance between religious communities which they do consciously without any pressure or coercion from any party. The factors that support good interfaith relations are the habit and awareness of the community to shoulder the burden borne by members or other residents by holding night patrols, mutual assistance, social gathering or crush. In addition, what supports the relationship between religious communities in the village of Sindang Sari is the support of religious leaders and village officials both formally and informally.

Abstrak

Pola hubungan masyarakat merupakan dasar proses sosial, yang menunjuk pada adanya pola hubungan sosial yang dinamis. Desa Sindang Sari merupakan salah satu desa yang ada pada Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, memiliki komunitas agama Islam, Kristen, Katolik dan Buddha, sedangkan masyarakatnya beretnis Jawa, Sunda, Palembang dan Batak. Namun, kehidupan dan pergaulan umat beragama disana tampil secara rukun dan tidak pernah terjadi konflik atau pertikaian yang berlatar belakang agama dan budaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola hubungan masyarakat lintas agama di desa Sindang Sari bersifat asosiatif, yaitu bentuk hubungan yang mengarah pada kerjasama dalam berbagai bentuk kehidupan sosial kemasyarakatan dan toleransi antar umat beragama yang mereka lakukan secara sadar tanpa adanya tekanan atau pun paksaan dari pihak manapun. Adapun Faktor yang menjadi pendukung terjadinya hubungan antar agama yang baik yaitu adanya kebiasaan dan kesadaran masyarakat untuk memikul beban yang ditanggung oleh anggota atau warga lainnya dengan cara mengadakan ronda malam, gotong royong, arisan atau jimpitan. Selain itu, yang menjadi pendukung terjadinya hubungan antar umat beragama di desa Sindang Sari adalah adanya dukungan dari tokoh-tokoh agama dan juga aparat desa baik secara formal ataupun non formal.

Keywords: *Relations, Interfaith Society, Harmonization*

A. Pendahuluan

Fakta kemajemukan masyarakat Indonesia jika dilihat dari latar belakang suku bangsa, sosial budaya, bahasa dan juga agama adalah merupakan kenyataan yang tidak dapat dielakkan. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut merupakan sumber kekayaan nasional yang tidak dimiliki oleh bangsa atau negara lain, disamping itu kesemuanya merupakan potensi konflik jika tidak berjalan secara *sinergi*. Oleh karena itu pluralitas¹ yang dimiliki bangsa Indonesia

¹Nurcholish Madjid menegaskan, Pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita adalah majemuk, beranekaragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekedar sebagai “kebaikan negatif” (*negative good*), hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme (*to keep fanaticism at bay*). Pluralisme harus dipahami sebagai “pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban” (*genuine engagement of diversitas within the bonds of civility*). Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawsan dan pengimbangan yang

dapat dikatakan sebagai suatu persoalan strategis. Dikatakan persoalan strategis karena integrasi bangsa menjadi dasar bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan prasyarat terciptanya stabilitas nasional yang sangat diperlukan bagi kelancaran pembangunan nasional.

Berikut ini adalah pengertian masyarakat majemuk dari beberapa ahli antara lain sebagai berikut:

- 1) Nasikun Menyatakan bahwa masyarakat mejemuk adalah masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih tertib social, komunitas atau kelompok-kelompok yang secara cultural, ekonomi, dan politik terpisah-pisah (terisolasi), serta memiliki struktur dan kelembagaan yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya.
- 2) J.S. Furnival mengatakan bahwa masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat dalam system nilai yang dianut oleh beberapa kesatuan social yang menjadi bagiannya sedemikian rupa, sehingga para anggotanya kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat secara keseluruhan.
- 3) Clifford Geertz, berpendapat bahwa masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terbagi-bagi dalam subsistem-subsistem yang lebih kurang terdiri dari diri sendiri dan terikat ke dalam ikatan-ikatan primordial.

Indonesia yang saat ini sedang membangun, tidak hanya membutuhkan para *designer* atau orang yang ahli dalam bidang pembangunan gedung bertingkat pencakar langit, jalan tol atau jembatan layang, bendungan kokoh, ahli pertambangan dan sumber daya alam lainnya. Tetapi juga membutuhkan faktor non-struktural yaitu agama, berupa motivasi dan dorongan dari masyarakat agama. Dorongan atau dukungan dri umat beragama terhadap pembangunan ialah menciptakan suasana rukun dan damai atau suasana yang harmonis di antara umat beragama.

dihasilkannya. Lihat Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat; Kolom-kolom di Tabloid Tekad*, (Jakarta : Paramdina, 1999), h. 63. Juga Nurcholish Madjid, "Hak-Asasi Manusia, Pluralisme Agama dan Integrasi Nasional : Antara Konsepsi dan Aktualisasi", dalam Anshari Thayib dkk., (ed.), *HAM dan Pluralisme Agama* (Surabaya : PKSK, 1997), h. 70.

Dengan adanya suasana yang harmonis tersebut, sehingga segala macam bentuk hasil pembangunan dapat dinikmati dan tidak dirusak oleh berbagai kerusuhan antar umat beragama. Hal ini sering terjadi di Indonesia, bahwa ketika terjadi kerusuhan yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) – terlebih lagi kerusuhan atas nama agama – maka segala macam fasilitas umum yang dibangun untuk kepentingan masyarakat turut pula menjadi “korban”.

Berkaitan dengan masalah integrasi bangsa, maka agama merupakan salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa agama seringkali dinyatakan sebagai kekuatan pengikat yang mempertautkan masyarakat, sekaligus juga dipandang sebagai sumber pertentangan dan konflik dalam masyarakat. Meski tensi dan konflik tersebut tidak sepenuhnya berasal dari agama, akan tetapi agama menjadikannya lebih rumit lewat penggunaan bahasa religius yang ekstensif. Dengan demikian relasi yang konfrontatif antar orang-orang yang berbeda agama di dunia sekarang ini merupakan salah satu fakta yang paling patut disayangkan.

Marshall yang dikutip oleh Syamsul Arifin, memperluas cakupan penggunaan konsep modal yang melampaui batas-batas ekonomi. Selain modal dalam pengertian material, manusia juga membutuhkan modal lainnya yaitu modal sosial dan modal spiritual. Modal sosial adalah kekayaan yang membuat komunitas dan organisasi berfungsi secara efektif demi kepentingan bersama. Adapun modal spiritual merupakan dimensi hakiki yang memberikan sentuhan maknawi dalam kehidupan manusia agar lebih bermakna secara substansial.² Meskipun modal sosial dan spiritual tidak berbentuk barang dalam arti ekonomi, lanjut Marshall, tetapi tidak boleh dipandang tidak memiliki manfaat ekonomi. Modal sosial memberikan manfaat yang lebih luas daripada bidang ekonomi. Dengan demikian, modal-modal lainnya yang ada dalam suatu komunitas perlu disinergikan dengan modal sosial.³

²Syamsul Arifin, *Studi Agama; Perspektif Sosiologi dan Isu-isu Kontemporer* (Malang : UMM Press. 2009), h. 77.

³*Ibid.*

Oleh karenanya dapat dipahami bahwa dalam pembangunan suatu bangsa yang dibutuhkan bukan hanya modal ekonomi, tetapi juga modal modal sosial dan spiritual yaitu *support* atau dukungan secara moral dari masyarakat yang *notabene* adalah masyarakat yang beragama. Dukungan ini hanya mungkin diperoleh jika masyarakat hidup dalam suasana rukun, damai dan harmonis.

Pada konteks ke-Indonesia-an pluralitas agama menyiratkan sebagai keberhasilan yang tertopang oleh landasan Idiil yaitu Pancasila dengan mottonya “Bhinneka Tunggal Ika” yang secara sederhana dapat diartikan “bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan”, serta landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 29. Indonesia – dalam bahasa sederhana – bukanlah negara yang berdasarkan agama (teokrasi),⁴ juga bukan negara yang sekular,⁵ tetapi Indonesia tepat berada di tengah-tengah

⁴James H. Smyle sebagaimana dikutip oleh Ahmad Sukardja merumuskan teokrasi sebagai “suatu bentuk pemerintahan dimana otoritas dan kekuasaan dianggap berasal dari Tuhan”. Penguasa di pandang secara langsung bertanggung jawab kepada Tuhan dan akan diadili oleh Tuhan. Kehendak raja biasanya dipandang sebagai kehendak Tuhan. Raja dianggap mempunyai *divine right of the King*. Pemerintahan Negara teokrasi ditandai dengan: 1) dominannya aturan Tuhan, 2) susunan pemerintahan ditujukan untuk melaksanakan aturan Tuhan, 3) pengukur bagi kebijakan dan putusan-putusan politik adalah norma aturan Tuhan. Lihat Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945; Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk* (Jakarta : UI Press.1995), h. 90. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teokrasi diberi arti yang sejalan dengan rumusan James H. Smyle tersebut. Disebutkan bahwa teokrasi adalah cara memerintah Negara yang berdasarkan kepercayaan bahwa Tuhan langsung memerintah Negara, hukum Negara yang berlaku adalah hukum Tuhan, pemerintahan dipegang oleh ulama atau organisasi keagamaan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka. 1989), h. 932. Jadi dengan demikian Negara teokrasi adalah : *Pertama*, Tuhan dianggap memerintah Negara melalui wakil-Nya, hukum Negara adalah hukum Tuhan, dan Negara hanya sebagai penyelenggara hukum Tuhan. *Kedua*, pemimpin Negara adalah ulama atau organisasi keagamaan. Dengan kata lain hukum Negara adalah hokum agama, dan Negara dipimpin oleh ahli agama sebagai wakil Tuhan.

⁵Sekularisasi adalah pelaksanaan dari sekularisme. Sekulerisme adalah paham, pandangan dan gerakan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan kepada ajaran agama. Prinsip essensial dari sekulerisme adalah menemukan perbaikan atau memperoleh kemajuan dengan kemampuan manusia itu sendiri. Dalam kaitannya dengan agama, sekulerisme memandang keduniaan dan agama masing-masing berdiri sendiri. Dalam implementasinya, kehidupan dan tingkah laku manusia dalam masyarakat perlu dilepaskan dari agama. Agama hanya

yaitu negara Pancasila dengan segenap nilai-nilainya. Hal ini karena Pancasila mengandung nilai-nilai berbagai agama di Indonesia, begitu juga dengan nilai demokrasi dan kemanusiaan.

Perdamaian dan kerukunan yang didambakan Islam juga agama-agama lain bukanlah sesuatu yang bersifat semu, tetapi yang memberi rasa aman pada jiwa setiap manusia. Karena itu langkah pertama yang dilakukan adalah mewujudkannya dalam jiwa setiap pribadi manusia Indonesia. Setelah itu melangkah kepada unit terkecil dalam masyarakat yakni keluarga. Dari sinilah, kemudian beralih ke masyarakat luas, seterusnya kepada seluruh bangsa dipermukaan bumi ini dan dengan demikian dapat tercipta perdamaian dunia dan dapat terwujud hubungan antar umat beragama secara harmonis serta toleransi dengan semua pihak.⁶

Desa Sindang Sari merupakan salah satu desa yang ada dikecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan memiliki ragam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik dan Buddha. Sedangkan jika dilihat dari tingkat pendidikan, rata-rata masyarakat disini sudah melek baca alias tidak buta hurup sebab masyarakat telah dapat mengenyam pendidikan minimal setingkat Sekolah Dasar. Adapun penghasilan mereka adalah kebanyakan sebagai petani karet, juga buruh kebun karet. Sedangkan profesi lain adalah sebagai guru, PNS, pedagang dan lain-lain.

Keempat agama yang ada di Desa Sindang Sari tersebut - jika merujuk pada Hasbullah Bakry – merupakan agama Missi (*Misionary Religions*).⁷ Pengertian agama misi secara sederhana dapat dipahami

dipandang sebagai urusan dan hubungan pribadi seseorang dengan Tuhannya. Sekulerisme membawa sekularisasi dilapangan politik. Secara umum sekularisasi dalam bidang politik ditandai dengan ciri-ciri : 1) pemisahan pemerintahan dari ideologi keagamaan dan struktur eklesiastik, 2) ekspansi pemerintah untuk mengambil fungsi peranan dalam bidang sosial ekonomi yang semula ditangani struktur keagamaan, dan 3) penilaian atas kultur politik ditekankan pada alasan dan tujuan keduniaan yang tidak transenden. Lihat Donald Eugene Smith, *Agama ditengah Sekularisasi Politik* (Jakarta : Pustaka Panjimas. 1985), terj. Azyumardi Azra, h. 13.

⁶ Kiki Muhamad Hakiki, *Politik Identitas Agama Lokal (Studi Kasus Aliran Kebatinan)*, Analisis, Volume XI, Nomor 1, Juni 2011, 4. 161.

⁷Hasbullah Bakry, *Suatu Perbandingan Mengenai Penyiaran Kristen dan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang), 1979), h. 17.

yaitu suatu agama dimana di dalamnya terdapat perintah dalam kitab suci agama masing-masing untuk menyebarkan ajaran agamanya. Bagi umat beragama yang menjalankan perintah tersebut yakni menyebarkan ajaran agamanya, maka tentu akan mendapat pahala dan surgalah tempatnya, sedangkan bagi umat beragama yang tidak menjalankan hal tersebut, maka umat agama tersebut akan mendapat dosa dan akan di masukkan neraka.

Menurut Hasbullah Bakry, ada dua kategori agama yaitu agama misi (*missionary religions*) dan bukan agama misi (*non missionary religions*). Maksudnya adalah agama yang memenuhi persyaratan untuk disiarkan atau disebarluaskan dan agama-agama yang tidak memenuhi persyaratan untuk disiarkan.⁸

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh agama misi (*missionary religions*) yaitu :

1. *Universality* (ke-umum-an), tidak terbatas untuk satu bangsa saja seperti Yahudi atau berkasta seperti Hindu,
2. *Continuity* (keberlangsungan) dalam penyebaran dan penyiaran,
3. *Adaptability*, kesanggupan dari agama itu untuk menyesuaikan diri sesuai dengan ajarannya sendiri dengan kondisi dan situasi lingkungan dan zamannya.⁹

Berdasarkan tiga kategori yang dikemukakan oleh Hasbullah Bakry tersebut, maka agama Islam, Kristen, Katolik serta Buddha dapat dianggap mempunyai syarat *universality*, karena missinya ditujukan tidak untuk satu bangsa saja dan tidak untuk membagi penganutnya ke dalam kasta-kasta seperti agama Hindu. Ketiga agama itu dianggap mempunyai syarat *continuity*, karena keadaannya atau ajarannya yang sekarang berasal atau berkelanjutan dan tidak terputus dari asalnya (Nabinya), dan sanggup dilanjutkan oleh penganutnya yang sekarang kepada anak cucunya melalui pelajaran yang diterimanya dari nenek moyangnya, serta sanggup juga menyampaikannya pada orang atau bangsa lain yang belum menganutnya. Ketiga agama itu juga dianggap mempunyai syarat *adaptability*, karena sanggup menyesuaikan diri dengan situasi dan

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

kondisi penganutnya yang berlainan daerah, tradisi, iklim dan lingkungan sosial disekitarnya.

Sudah jamak, dalam doktrin agama yang tergolong *missionary religions* maka terdapat perintah yang berasal dari kitab suci masing-masing akan kewajiban untuk menyebarkan keseluruh umat yang ada dimuka bumi ini, yang jika perintah tersebut diabaikan, maka penganutnya akan mendapat dosa dan sangsi, sebaliknya jika tersebut direspon secara positif dan dilaksanakan secara konsisten, maka pahala dan surga akan menjadi imbalannya. Dalam tataran pelaksanaan perintah agama tersebut, tidak jarang terjadinya benturan-benturan sehingga konflik atas nama agama yang konon ditengarai akibat dari penyiaran agama sudah sering terjadi, seperti yang terjadi di Vietnam, Irlandia Utara, India dan lain-lain, termasuk juga pada beberapa daerah di Indonesia seperti di Ambon, Sampit, Tasikmalaya dan lain-lain.

Akan tetapi, yang menarik, justru kehidupan umat beragama di desa Sindang Sari yang dihuni oleh ketiga penganut agama missi tersebut tampil secara mengesankan; dalam kehidupan dan pergaulan umat beragama disana tampil secara rukun, damai dan harmonis, serta tidak pernah terjadi konflik atau pertikaian yang berlatar belakang agama. Kondisi ini sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Desa Sindang Sari “Kehidupan masyarakat disini, mulai dari dulu sampai sekarang, tidak pernah terjadi konflik dan pertikaian yang bermotifkan agama”.¹⁰ Hal senada juga dikemukakan oleh Supriyadi; “Bahkan dalam peringatan hari raya keagamaan, kami sudah terbiasa untuk saling mengunjungi dan bersilaturahmi, semua itu dilakukan oleh masing-masing umat beragama, selain itu jika ada keluarga yang tertimpa musibah ataupun melakukan hajatan, maka keluarga yang lain turut pula datang dan ikut membantu keluarga yang tertimpa musibah ataupun yang melakukan hajatan tadi”.¹¹ Selain itu menurut salah seorang warga bahwa “disini kami memiliki rasa persatuan dan penghormatan yang tinggi, ketika memperingati hari raya besar agama, kami memiliki kebiasaan untuk memberikan selamat dengan cara berkunjung kerumah orang yang sedang melaksanakan

¹⁰Wawancara dengan Sugeng Widodo, (Kepala Desa Sindang Sari), tanggal 30 September 2017.

¹¹Wawancara dengan Supriyadi (Sekretaris Desa Sindang Sari), tanggal 30 September 2017.

peringatan hari besar keagamaan, dan hal itu kami lakukan dengan tanpa canggung”.¹² Sedangkan menurut Yohanes “seingat saya waktu dari kecil hingga kini, disini tidak pernah terjadi gejolak atau keributan yang dilatarbelakangi oleh agama. Kalaupun ada keributan biasanya tidak lebih dari perbuatan orang yang iseng seperti mencuri hasil pertanian dikebun dan disawah atau mencuri di rumah sewaktu si punya rumah pergi. Jadi bukan karena agama”.¹³

Berdasarkan beberapa sumber hasil wawancara dengan aparat desa dan masyarakat yang ada di desa Sindangsari tersebut, setidaknya dapat dipahami, bahwa di desa tersebut tidak pernah terjadi konflik atau pun pertikaian yang mengatasnamakan agama, sebaliknya hubungan antar umat beragama disana pun berjalan dengan baik.

B. Teori

Persoalan pola hubungan masyarakat multi agama, merupakan persoalan klasik, namun tetap aktual karena tidak pernah sepi dari peristiwa-peristiwa yang muncul dimana hal tersebut belum ada sebelumnya. Sehingga mengharuskan untuk dilakukan sebuah penelitian yang representatif dengan menggunakan berbagai pendekatan yang tepat. Selama ini memang sudah terdapat banyak penelitian yang mencoba mengurai persoalan pola hubungan masyarakat multi agama, akan tetapi karena metode yang digunakan kurang memadai (seperti hanya melihat dari aspek doktrin agama juga persoalan ketidakseriusan dalam melakukan penelitian), maka hasilnya pun – dapat ditebak – belum dapat memberikan solusi atas problem umat beragama, apalagi untuk dijadikan contoh bagi penelitian-penelitian yang lain.

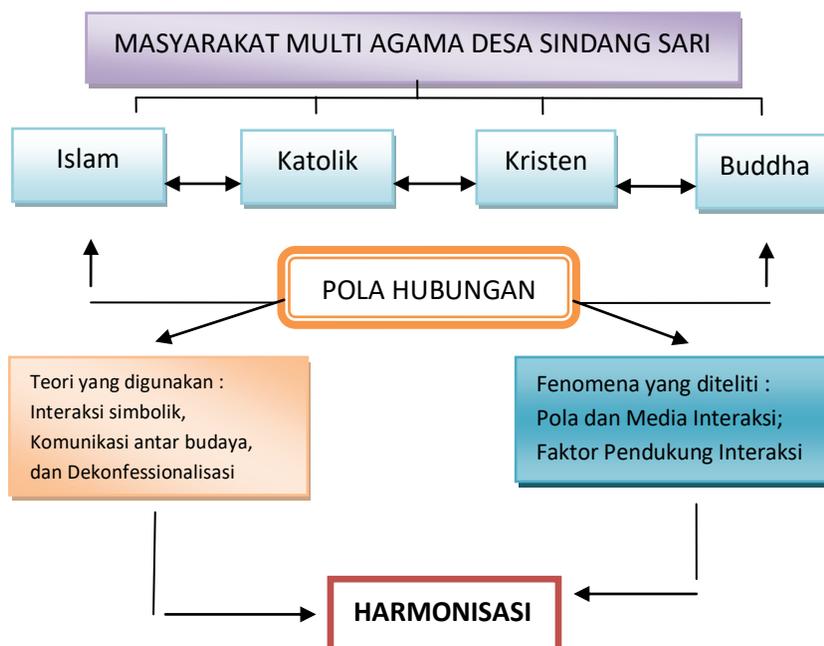
Menurut peneliti, dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan suatu pola hubungan secara langsung atau tatap muka pada komunitas antar umat beragama, maka terdapat banyak aspek yang harus dilihat; seperti aspek budaya, aspek identitas, juga aspek doktrin. Oleh karena itu, dalam konteks ini peneliti akan

¹²Wawancara dengan Dwi Rosadi (agama Buddha), tanggal 30 September 2017.

¹³Wawancara dengan Yohanes (agama Katolik), tanggal 30 September 2017.

menggunakan beberapa teori yaitu teori interaksi simbolik dari Mead, teori komunikasi antar budaya dari Gudykunst¹⁴, dan teori dekonfessionalisasi¹⁵. Adapun fenomena yang akan diteliti dalam hal ini adalah pola dan media hubungan masyarakat multi agama, serta aspek doktrin dari agama Islam, Katolik, Kristen dan Buddha.

Secara rinci riset desain dalam rencana penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :



C. Penutup

1. Pola hubungan masyarakat lintas agama di desa Sindang Sari adalah paradigma yang bersifat asosiatif, yaitu bentuk hubungan yang mengarah pada kerjasama dalam berbagai bentuk kehidupan sosial kemasyarakatan dan toleransi antar umat beragama yang mereka lakukan secara sadar tanpa

¹⁴Lihat Usman, Rani. A, *Etnis Cina Perantauan Aceh*, (Jakarta : Yayasan Obor, 2009), h. 9-30.

¹⁵C.A.O. Van Nieuwenhuijze, "Islam and National Self-Realization in Indonesia", Nieuwenhuijze , *Cross Cultural Studies* (The Hageu : Monton and Co. 1973), h. 152.

adanya tekanan atau pun paksaan dari pihak manapun. Sehingga hubungan masyarakat lintas agama di sana berjalan secara natural.

2. Media yang digunakan bagi terjalannya harmonisasi masyarakat lintas agama desa Sindang Sari yaitu adanya peran dari tokoh-tokoh agama dan juga aparat desa baik secara formal ataupun non formal. Secara formal berupa ucapan lisan setiap kali mereka melakukan rapat atau pertemuan agar suasana rukun dan damai agar terus dipelihara. Adapun yang non formal dilakukan setiap ada waktu dan kesempatan tokoh-tokoh agama dan aparat desa selalu memberikan wejangan ataupun nasehat kepada masyarakatnya akan pentingnya kehidupan yang rukun. Sebab bagaimanapun, hidup dalam suasana yang rukun dan damai adalah lebih baik, ketimbang dalam suasana konflik, karena banyak sekali yang dirugikan.
3. Faktor yang menjadi pendukung terjadinya harmonisasi masyarakat lintas agama desa Sindang Sari yaitu adanya kebiasaan dan kesadaran masyarakat untuk memikul beban yang ditanggung oleh anggota atau warga lainnya dengan cara mengadakan gotong royong, ronda malam, arisan atau jimpitan.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani, *Sosiologi; Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara. 1994.
- Achmad Mubarak, *Perbandingan Agama Islam dan Kristen : Studi Tentang Sakramen Gereja*, Bandung: Pustaka, 1985.
- Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945; Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemu*, Jakarta: UI Press.1995.
- A. Rani Usman, *Etnis Cina Perantauan Aceh*, Jakarta: Yayasan Obor, 2009.
- C.A.O. Van Nieuwenhuijze, "Islam and National Self-Realization in Indonesia", Nieuwenhuijze , *Cross Cultural Studies*, The Hageu: Monton and Co. 1973.
- Cholid Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama: perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- , *Sosiologi Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1997.
- , *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta: Balitbang Kerukunan, 1997.
- Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *Daftar Isian Potensi Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan*, 2012.
- Donald Eugene Smith, *Agama ditengah Sekulerisasi Politik*, ter. Azyumardi Azra, Jakarta: Pustaka Panjimas. 1985.
- F.X. E. Armada Riyanto, *Dialog Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan, Jakarta: Kencana, 2012.

- Gillin dan Gilling, *Cultural Sociology: a Revision of an Introduction to Sociology*, New York: The Macmillan Company, 1974.
- Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat; Akar Kekerasan dan Diskriminasi*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Hasbullah Bakry, *Suatu Perbandingan Mengenai Penyiaran Kristen dan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Hugh Goddard, *Menepis Standar Ganda*, terj. Ali Noer Zaman, Yogyakarta: Qalam, 2000.
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadi Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Kiki Muhamad Hakiki, *Politik Identitas Agama Lokal (Studi Kasus Aliran Kebatinan)*, Analisis, Volume XI, Nomor 1, Juni 2011, 4.
- Kingaley Davis, *Human Society*, New York: The Macmillan Company, 1970.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Benteng, 1997.
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Margareth M. Poloma (ed), *Sosiologi Kontemporer*, terj. Yasogama, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Marcel A. Boisard, *Humanisme Dalam Islam*, alih Bahasa M. Rasyidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- M. Amin Abdullah, "Al-Qur'an dan Pluralisme dalam Wacana Posmodernisme", dalam *Jurnal Studi Islam "Profetika"*, vol. 1, No. 1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1999.
- Mustoha et. al (peny.), *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1997.

- Nasrullah Nazir, *Teori-Teori Sosiologi*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Keindonesiaan*, Jakarta: Paramadina, 1992.
- Nurcholish Madjid, “Kata Pengantar”, dalam Sukidi, *Teologi Inklusif Cak Nur* (Jakarta : Kompas, 2001), h. xxxviii.
- , *Islam; Kemodernan dan Keindonesiaan*, Jakarta: Mizan, 1987.
- , “Etika Beragama; dari Perbedaan Menuju Persamaan (Kata Pengantar)”, dalam Nur Achmad (ed.), *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman*, Jakarta: Kompas, 2001.
- , “Hubungan Antar Beragama : Antara Ajaran dan Kenyataan”, dalam W.A.L. Stokhof (red.), *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia (Beberapa Permasalahan)*, Jakarta : INIS, 1990.
- , *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat: Kolom-kolom di Tabloid Tekad*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- R. Riyadi Soeprapto, *Interaksionisme Simbolik; Perspektif Sosiologi Modern*, Malang: Averroes Press, 2002.
- Said Agil Husin Al Munawar, *Fiqih Hubungan Antar Agama*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers. 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif-Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009.
- Sutrisno Hadi, *Metode Riset*, Yogyakarta: UGM Press, 1986.
- Syamsul Arifin, *Studi Agama; Perspektif Sosiologi dan Isu-isu Kontemporer*, Malang : UMM Press. 2009.
- Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern; Teori, Fakta dan Aksi Sosial*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sosiologi Untuk Universitas*, Bandung: Refika Aditama, 2013.

Wawancara dengan Sapuan (agama Islam), warga desa Sindang Sari, tanggal 21 September 2017.

Wawancara dengan Sugeng Widodo, (Kepala Desa Sindang Sari), tanggal 30 September 2017.

Wawancara dengan Supriyadi (Sekretaris Desa Sindang Sari), tanggal 30 September 2017.

Wawancara dengan Dwi Rosadi (agama Buddha), tanggal 30 September 2017.

Wawancara dengan Yohanes (agama Katolik), tanggal 30 September 2017.

Wawancara dengan Paijo, (Pemuda Desa beragama Kristen), tanggal 9 September 2017.

Wawancara dengan Bapak Tukul (Kaur Kesra Desa Sindang Sari), tanggal 21 September 2015.

Wawancara dengan M. Rusli, (Penganut agama Islam), tanggal 21 September 2015.

